

# BERITA RESMI STATISTIK



## INDIKATOR EKONOMI MAKRO PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2017

Meski pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dibandingkan kondisi triwulan II-2016, namun secara umum indikator ekonomi lainnya (selain pertambangan bijih logam) menunjukkan perekonomian Provinsi NTB pada triwulan II 2017

- Dibandingkan kondisi TW II-2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB masih mengalami kontraksi. Kendati demikian jika dibandingkan dengan triwulan I-2017 ekonomi NTB tumbuh 6 persen.
- Petani NTB pada triwulan II-2017 mengalami surplus tipis dengan NTP sebesar 104,49.
- Walau bernilai sama dengan kondisi Triwulan IV-2016 (inflasi 1,14 persen) namun komoditas penyebab inflasi mengalami pergeseran.
- Nilai ekspor maupun impor di Triwulan II-2017 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi triwulan I-2017.
- Momen libur hari raya memberi dampak signifikan terhadap arus kunjungan ke Provinsi NTB. Arus kedatangan sebesar 514.446 orang yang tercatat pada triwulan II-2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa triwulan sebelumnya. Kondisi ini juga berimbas pada peningkatan Tingkat Hunian Kamar Triwulan II-2017 baik untuk hotel bintang maupun non bintang.
- Remitansi pada Triwulan II-2017 mencapai 464 milyar rupiah, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan remitansi di triwulan yang sama tahun 2016, namun remitansi triwulan II lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2017.
- Kondisi perekonomian (tidak termasuk tambang bijih logam) cukup stabil dan terkendali di Triwulan II-2017, hal ini juga diindikasikan oleh BI seven days repo rate yang masih berada pada angka 4,75 persen.

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi dan informasi, ketersediaan indikator ekonomi menjadi penting sebagai tolok ukur kondisi perekonomian yang sedang berlangsung di suatu wilayah sekaligus memberikan sinyal arah perekonomian yang akan datang. Melalui indikator ekonomi dapat dilihat perilaku pasar, stabilitas harga dan masih banyak lagi yang efeknya tidak hanya pada dunia perekonomian itu sendiri namun juga dapat menyangkut aspek kehidupan sosial dan bahkan tak jarang dapat mempengaruhi dunia politik. Indikator ekonomi merupakan informasi yang paling sering dicari baik oleh kalangan pengusaha, peneliti, maupun pemerintah. BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua berupaya memenuhi kebutuhan akan indikator ekonomi tersebut dan salah satunya melalui publikasi ini.

## II. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulus bagi produktivitas, kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tidak heran selain menjadi tolok ukur berjalannya roda perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu alokator DAU bagi pemerintah daerah. Data mengenai pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan turunannya disajikan setiap triwulan untuk memberikan gambaran perekonomian wilayah.

Tabel 1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I -2016 dan Triwulan II-2017

Keterangan	Tw I-2016	Tw II-2016	Tw III-2016	Tw IV-2016	Tahun 2016	Tw I-2017	Tw II-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
PDRB adhb (Triliun Rp)	Dengan Tambang	27,35	28,79	31,06	29,04	116,25	28,10	30,35
	Tanpa Tambang	22,24	23,49	24,82	23,45	94,00	24,09	25,73
PDRB adhk (Triliun Rp)	Dengan Tambang	22,64	23,56	25,21	23,14	94,55	21,79	23,10
	Tanpa Tambang	17,28	18,19	19,13	17,86	72,46	18,17	19,24
Pertumbuhan Ekonomi	Dengan Tambang	8,36	8,18	3,43	3,77	5,82	-3,74	-1,96
	Tanpa Tambang	5,44	7,14	5,24	5,05	5,71	5,17	5,77
PDRB/kapita Adhb (Juta Rp)	Dengan Tambang					23,74		
	Tanpa Tambang					19,20		

Ket: Angka sangat sementara

Memasuki Triwulan II- 2017, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi NTB mencapai lebih dari 30 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan yang sama di tahun 2016, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,5 triliun rupiah. Sayangnya untuk PDRB atas dasar harga konstan tidak terjadi hal yang sama, karena kondisi Triwulan II-2017 justru lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan II-2016 mengakibatkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar -1,96 persen. Sebagai Provinsi yang memiliki pertambangan mineral, tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB banyak dipengaruhi oleh fluktuasi output yang dihasilkan dari lapangan usaha ini. Namun jika pertambangan diabaikan, maka terlihat jelas bahwa perekonomian Provinsi NTB pada Triwulan II-2017 meningkat diatas pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,77 persen.

Sumber utama kontraksi ekonomi Provinsi NTB pada Triwulan II-2017 (y on y) adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan sumbangan sebesar -6,16 poin. Sumber pertumbuhan tertinggi yang menjadi pendongkrak kinerja ekonomi berasal dari lapangan usaha konstruksi (0,77 poin), diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan (0,68 poin) dan lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor (0,68 poin). Sehingga apabila lapangan usaha pertambangan dikeluarkan dari penghitungan, Provinsi NTB mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77 persen di triwulan II-2017 (y on y).

### **III. INFLASI DAN NILAI TUKAR PETANI (NTP)**

Kenaikan harga identik dengan inflasi. Naik turunnya inflasi menjadi suatu peristiwa penting dalam fenomena ekonomi. Meskipun secara umum inflasi berarti terdapat kenaikan harga, namun inflasi juga diperlukan sebagai salah satu stimulus agar perekonomian bisa tumbuh. Namun disisi lain berdampak pada merosotnya daya beli ketika pendapatan masyarakat tidak meningkat, untuk itu inflasi perlu dijaga agar tidak sampai mengganggu kehidupan sosial masyarakat secara umum, Para ekonom menekankan bahwa inflasi merupakan proses, oleh sebab itu diperlukan suatu mekanisme untuk menekan inflasi agar dapat memberikan imbas yang positif terhadap perekonomian.

Bertolak belakang dengan inflasi, deflasi merupakan kondisi dimana harga-harga mengalami penurunan, hal ini menguntungkan masyarakat konsumen. Namun sebaliknya bagi pelaku ekonomi hal ini justru diwaspadai, karena deflasi dalam jangka panjang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan. Akibatnya perusahaan akan mengurangi pegawai untuk menekan biaya produksi, dan selanjutnya efek sosial yang lebih lanjut akan mengikuti.

Inflasi dan deflasi memiliki peranan dalam mempengaruhi perdagangan internasional baik itu impor maupun ekspor. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan harga produk dalam negeri lebih mahal dari harga produk luar negeri, konsumen dengan sendirinya akan memilih untuk menggunakan produk impor yang lebih murah tersebut dan ekspor akan lesu sebab harganya tidak mampu bersaing dengan produk yang sama dari negara lain. Inflasi yang tinggi berdampak juga pada kehidupan sosial seperti pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Tabel 2. Inflasi dan Nilai Tukar Petani Triwulanan Provinsi NTB 2016 dan Triwulan I-2017

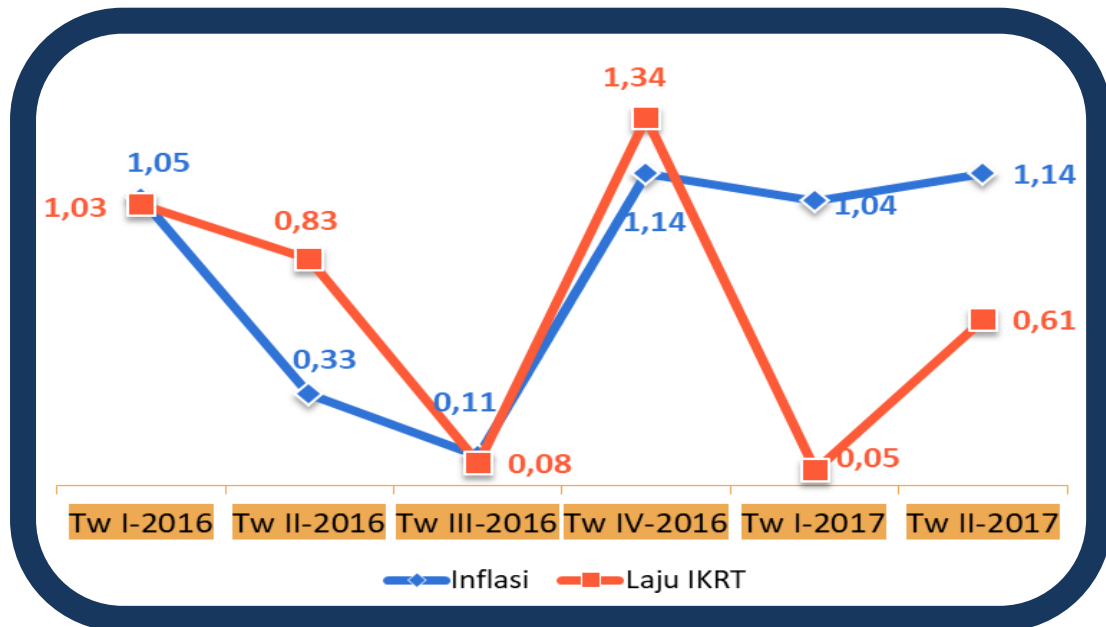
Keterangan	Tw I-2016	Tw II-2016	Tw III-2016	Tw IV-2016	Tw I-2017	Tw II-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inflasi	1,05	0,33	0,11	1,14	1,04	1,14
Bahan Makanan	3,56	0,20	-0,72	1,20	-2,39	1,06
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,55	1,78	0,65	1,83	1,23	1,53
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,07	0,13	0,29	1,79	2,58	0,81
Sandang	1,74	1,32	2,89	-1,31	2,24	2,20
Kesehatan	1,71	0,66	0,93	1,29	1,29	0,82
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,48	0,13	1,43	0,28	-0,13	0,14
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,45	-1,20	-1,27	0,15	3,31	1,42
NTP	104,92	103,85	105,98	107,05	105,00	104,49
Laju pertumbuhan IKRT	1,03	0,83	0,08	1,34	0,05	0,61
Ekspor (US\$)	374 006 759	397 118 155	455 733 497	358 762 521	187 656 275	220 999 736
Impor (US\$)	46 807 478	33 161 208	72 967 737	14 797 468	16 848 122	16 987 519

Hingga triwulan II-2017 inflasi umum triwulanan di Provinsi NTB tampak terkendali dan berada pada kisaran kurang dari 2 persen setiap triwulannya. Selain mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi NTB berjalan cukup baik, juga menjadi bukti nyata bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah telah bekerja dengan baik. Pada triwulan II-2017 semua komoditas mengalami inflasi tipis dengan kisaran antara 0,14 hingga 2,20 persen. Komoditas pendidikan, olahraga dan rekreasi merupakan komoditas dengan inflasi terendah sedangkan komoditas sandang merupakan komoditas dengan inflasi tertinggi dan bahkan lebih tinggi dari inflasi umum Provinsi NTB pada triwulan II. Jika dilihat pergerakannya sejak triwulan I-2017, inflasi yang terjadi pada komoditas sandang masih cenderung bergerak naik.

Walau tipis, petani di Provinsi NTB masih dapat menikmati surplus pada triwulan II-2017, namun jika dibandingkan dengan triwulan I-2017 surplus yang diperoleh petani cenderung lebih

sedikit. Jika inflasi umum mencerminkan inflasi di daerah perkotaan, maka laju pertumbuhan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang merupakan salah satu komponen untuk menghitung NTP, menjadi indikator inflasi di daerah perdesaan. Dalam dua triwulan terakhir, inflasi di perdesaan cenderung lebih rendah di daerah perkotaan.

Grafik 1. Laju Pertumbuhan IKRT dan Inflasi Perkotaan Provinsi NTB 2016



Sebagaimana diilustrasikan pada grafik 1, laju pertumbuhan IKRT triwulanan cenderung memiliki pola mengikuti laju inflasi perkotaan, bahkan pada triwulan I-2016 dan triwulan III-2016 hampir berhimpitan. Pada triwulan II-2016 dan triwulan IV-2016 laju pertumbuhan IKRT sedikit lebih tinggi dari inflasi perkotaan. Jika dibandingkan dengan triwulan II-2016, laju pertumbuhan IKRT justru lebih rendah pada kondisi triwulan II-2017 ini. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa harga di perdesaan pada triwulan II-2017 selain lebih rendah dari harga di perkotaan, juga lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

#### IV. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Kegiatan perdagangan antar daerah bahkan internasional menimbulkan ekspor dan impor. Semakin tinggi ketergantungan wilayah terhadap impor dari luar daerah terlebih luar negeri akan berimbas pada mudahnya wilayah tersebut terpengaruh oleh situasi perekonomian di luar wilayah. Ekspor maupun impor baik antar daerah maupun antar negara tidak hanya dapat memberikan keuntungan bagi dunia usaha, namun juga menguntungkan pemerintah melalui penerimaan pajak.

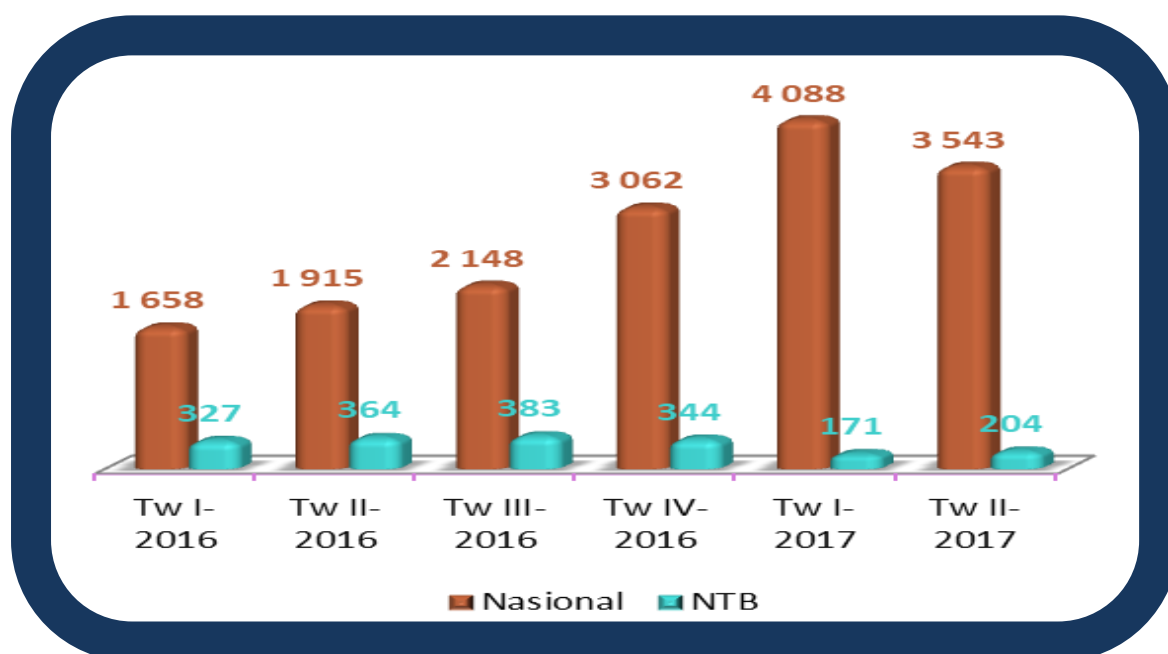
Tabel 3. Ekspor dan Impor Provinsi NTB 2016 dan Triwulan II-2017 (juta US\$)

Keterangan	Tw I-2016	Tw II-2016	Tw III-2016	Tw IV-2016	Tw I-2017	Tw II-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ekspor	374,01	397,12	455,73	358,76	187,66	221,00
Impor	46,81	33,16	72,97	14,80	16,85	16,99
Net	327	364	383	344	171	204

Ekspor cenderung mengalami peningkatan dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2016. Kendati demikian pada triwulan IV-2016 terjadi penurunan ekspor bahkan kondisi ekspor di triwulan I-2017 berkurang 48 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2016. Penurunan ekspor yang ekstrim inilah yang memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2017. Kondisi ekspor pada triwulan II-2017 sedikit membaik dan tercatat meningkat 18 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingginya nilai ekspor dari Provinsi NTB lebih didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga.

Jika diakumulasikan, dalam beberapa triwulan terakhir nilai ekspor masih lebih tinggi dari impor, walaupun ekspor didominasi oleh ekspor konsentrat. Ini berarti bahwa surplus terjadi pada perdagangan luar negeri di provinsi NTB dan tentunya akan menyumbang pada devisa yang diterima negara.

Grafik 2. Net Ekspor Luar Negeri Triwulanan Provinsi NTB dan Nasional



Membandingkan net ekspor Provinsi NTB dengan Nasional, tampak bahwa net ekspor Indonesia melemah pada triwulan II-2017. Kendati demikian jika dibandingkan dengan triwulan II-2016 maka net ekspor Indonesia triwulan II-2017 jauh mengalami peningkatan.

Ekspor dari Provinsi NTB tercatat lebih banyak ditujukan ke negara-negara di Asia seperti Jepang, Filipina dan Korea Selatan, namun tak jarang juga ekspor ditujukan ke Amerika dan beberapa negara di Eropa khususnya untuk barang kerajinan. Nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah memiliki andil dalam menggerakkan ekspor dan impor. Meningkatnya nilai tukar mata uang asing memang menguntungkan ekspor, namun akan menjadi berat untuk impor. Secara umum pergerakan nilai tukar mata uang walaupun fluktuatif namun masih bergerak pada level yang aman. Berikut disajikan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing di akhir setiap triwulan .

Tabel 4. Nilai Konversi Rupiah Terhadap Mata Uang Beberapa Negara

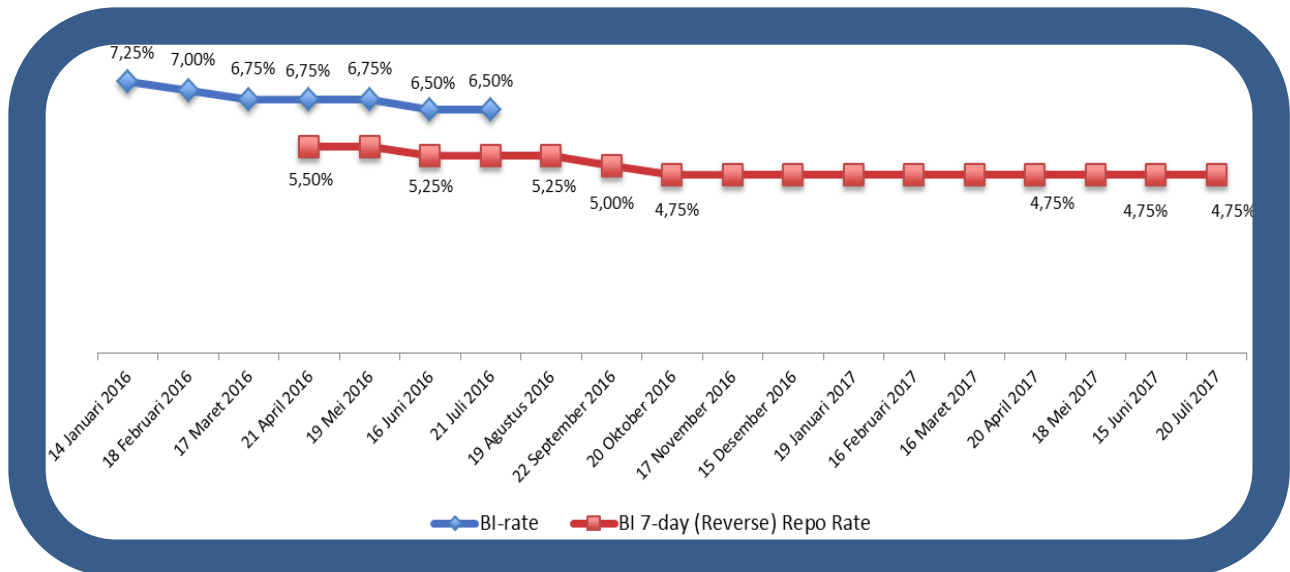
No	Mata Uang	31 Maret 2016	30 Juni 2017	30 Sept 2016	31 Des 2016	31 Maret 2017	30 Juni 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	AUD - Australian Dollar	10 108,29	9 766,00	9 861,40	9 675,15	10 131,36	9 997,31
2	GBP - British Pound	18 960,31	17 591,12	16 761,17	16 418,47	16 554,25	16 781,01
3	CNY - Chinese Yuan Renminbi	2 044,51	1 977,62	1 936,72	1 927,20	1 921,06	1 943,19
4	EUR - Euro	14 953,72	14 576,21	14 503,07	14 089,59	14 155,27	14 798,51
5	USD - US Dollar	13 210,00	13 114,00	12 933,00	13 369,00	13 254,00	13 252,00
6	JPY - Japanese Yen	117,57	127,62	128,07	114,81	118,23	119,39
7	MYR - Malaysian Ringgit	3 369,90	3 259,76	3 119,39	2 980,16	2 992,55	3 092,65
8	SGD - Singapore Dollar	9 777,94	9 720,55	9 471,26	9 251,90	9 481,36	9 540,68

Sumber: <http://kursdollar.net/history-kurs/2016/Desember/31/>

BI rate dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian termasuk diantaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi diperkirakan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya BI rate akan diturunkan apabila inflasi diperkirakan akan berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kesimpulannya BI rate digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk dapat mengontrol perekonomian negara dan menjaga stabilitasnya. Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan BI *7 days Repo Rate* yang efektif mulai berlaku sejak 19

Agustus 2016. Dengan kebijakan baru ini BI berharap agar penyaluran kredit dari bank lebih lancar kepada masyarakat dan sekaligus menekan kredit macet.

Grafik 3. BI Rate dan BI 7 Days Repo Rate



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Pemerintah tampak menetapkan BI rate yang cukup tinggi di awal tahun 2016, namun seiring dengan semakin membaiknya perekonomian, BI rate diturunkan hingga ketetapan terakhir yang dikeluarkan pada 20 April 2017 yaitu sebesar 4,75 persen dan masih terus berada pada posisi tersebut hingga triwulan II-2017 ini.

## V. ARUS KUNJUNGAN DAN TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL

Memiliki potensi alam yang indah, Provinsi NTB berusaha menggalakkan pariwisata tak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun juga untuk dapat membantu meningkatkan lapangan pekerjaan sekaligus memberikan stimulan bagi industri kreatif berbasis rumah tangga. Jumlah kunjungan dapat dipantau melalui jumlah penumpang yang datang ke Provinsi NTB baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara. Sebagai provinsi yang diapit oleh laut, untuk dapat memasuki NTB melalui jalur darat, pelancong tetap harus menggunakan jalur laut sehingga jumlah kunjungan ke Provinsi NTB dicatat melalui jalur laut dan jalur udara. Penghargaan *World Best Halal Tourism Destination* yang diterima oleh Provinsi NTB pada tahun 2015 memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke NTB.



Tabel 5. Arus Penumpang Angkutan Darat dan Laut Provinsi NTB Tw I-2016 hingga Tw I-2017

Keterangan	Tw I-2016	Tw II-2016	Tw III-2016	Tw IV-2016	Tw I-2017	Tw II 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Angkatan Laut</b>	<b>31 471</b>	<b>22 519</b>	<b>55 824</b>	<b>32 673</b>	<b>26 862</b>	<b>26 413</b>
Datang	17 230	12 391	26 916	15 535	12 950	13 266
Berangkat	14 241	10 128	28 908	17 138	13 912	13 147
<b>Angkatan Udara</b>	<b>766 794</b>	<b>895 675</b>	<b>1 011 588</b>	<b>960 858</b>	<b>859 048</b>	<b>955 684</b>
Datang	385 254	474 884	505 531	502 253	435 569	514 446
Berangkat	381 540	420 791	506 057	458 605	423 479	441 238

Melalui angkutan laut, jumlah penumpang yang datang mengalami peningkatan namun jumlah penumpang yang berangkat sedikit mengalami penurunan pada Triwulan II-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya. Animo masyarakat untuk melalui jalur laut di triwulan II-2017 cenderung lebih tinggi dibandingkan Triwulan II-2016 hal ini tampak dari lebih banyaknya kedatangan maupun keberangkatan di triwulan II-2017 yang tercatat lebih tinggi dari triwulan II-2016.

Triwulan II-2017 merupakan gerbang menuju *peak season* dalam dunia pariwisata. Momen hari raya Idul Fitri dan libur sekolah anak banyak dimanfaatkan oleh wisatawan terutama lokal untuk berlibur dan menikmati keindahan alam Lombok. Minat wisatawan untuk berkunjung ke NTB terindikasi semakin meningkat baik itu saat ada momen nasional maupun tidak. Hal ini tergambar melalui meningkatnya arus keberangkatan maupun kedatangan yang tercatat melalui jalur udara pada triwulan II-2017 yang jauh lebih banyak dibandingkan triwulan I-2016. Arus kunjungan ini diharapkan akan semakin meningkat di triwulan III mendatang karena untuk internasional, *peak season terjadi pada triwulan tersebut*. Kecenderungan memilih jalur udara untuk mengunjungi NTB dapat menjadi stimulan baik bagi maskapai penerbangan bahwasanya pangsa pasar Provinsi NTB cukup potensial. Terlebih dengan telah dibukanya jalur baru penerbangan internasional menuju Korea Selatan, diharapkan dapat lebih mendongkrak arus kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB.

Tabel 6. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Provinsi NTB Tw I-2016 hingga Tw I-2017

TPK	Tw I-2016	Tw II-2016	Tw III-2016	Tw IV-2016	Tw I-2017	Tw-II-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hotel Bintang	41,73	45,17	42,72	44,66	41,98	48,16
Hotel Non Bintang	29,22	29,77	29,33	25,84	22,08	24,40

TPK Hotel Bintang pada Triwulan II-2017 meningkat cukup signifikan dibandingkan Triwulan I-2017. Tidak hanya itu dibandingkan Triwulan II-2016, TPK hotel bintang juga jauh lebih tinggi. Kendati TPK hotel non bintang lebih tinggi dibandingkan kondisi triwulan I-2017, namun lonjakannya tidak setinggi pada hotel Bintang. Bahkan jika dibandingkan dengan triwulan II-2016, TPK hotel non bintang justru turun cukup signifikan. Penambahan jumlah hotel bintang di Provinsi NTB disinyalir menjadi salah satu faktor yang membuat konsumen lebih memilih hotel bintang dibandingkan non bintang. Kehadiran aplikasi liburan yang menawarkan kemudahan reservasi hotel bintang dengan harga yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

Kehadiran hotel non bintang sebenarnya diharapkan untuk membantu perekonomian masyarakat, selain memberikan alternatif akomodasi yang terjangkau hotel non bintang juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Agar dapat bersaing dengan hotel berbintang, hotel non bintang perlu meningkatkan sistem pemasarannya, setidaknya dalam hal penggunaan aplikasi liburan. Dengan demikian opsi bagi pengunjung lebih variatif dan pangsa pasar hotel non bintang akan lebih luas.

## VI. KETENAGA KERJAAN

TPAK di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2017 menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi Agustus dan Februari 2016. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 sekitar 2.520,67 ribu orang, naik dibanding keadaan Agustus 2016. Jika dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu (Februari 2016), angkatan kerja bertambah sekitar 138,05 ribu orang.

Jumlah penganggur pada Februari 2017 sekitar 97,22 ribu orang, bertambah sekitar 200 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016, atau bertambah sekitar 10,04 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016. Secara persentase, tingkat pengangguran pada bulan Februari 2017 mengalami penurunan sekitar 0,08 poin persen dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016. Sementara, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, tingkat pengangguran mengalami kenaikan sekitar 0,2 poin.

Tabel 7: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi NTB

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
1. Angkatan Kerja	Org(ribuan)	2.382,62	2.464,33	2.520,67
Bekerja	Org(ribuan)	2.295,44	2.367,31	2.423,45
Penganggur	Org(ribuan)	87,18	97,02	97,22
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,71	71,57	72,62
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,66	3,94	3,86
4. Pekerja tidak penuh	Org(ribuan)	953,06	809,53	945,93
Setengah penganggur	Org(ribuan)	387,24	328,45	341,92
Paruh waktu	Org(ribuan)	565,82	481,08	604,01

## VII. REMITANSI

Remitansi diartikan sebagai kiriman uang dari WNI yang bekerja di luar negeri ke Indonesia. Menurut Bank Indonesia remitansi memberikan sumbangan bagi APBN sebesar 10 persen. Selain itu remitansi juga memberikan dampak positif bagi peningkatan keuangan inklusif. Remitansi merupakan sumber yang penting dalam dukungan keuangan yang secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga migran. Remitansi mendukung investasi rumah tangga dalam kesehatan, pendidikan dan usaha kecil rumah tangga, (world bank,2002).

Tabel 8. Remitansi ke Provinsi NTB

Triwulan	Bank Indonesia	PT POS	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Triwulan I-2016	110 462 809 188,08	364 044 765 313,00	474 507 574 501,08
Triwulan II-2016	94 829 712 645,99	380 033 201 301,00	474 862 913 946,99
Triwulan III-2016	88 013 559 565,40	325 452 807 865,00	413 466 367 430,40
Triwulan IV-2016	84 778 899 212,99	332 444 149 156,00	417 223 048 368,99
Triwulan I- 2017	73 060 398 557,63	274 844 526 740,00	347 904 925 297,63
Triwulan II 2017	102 066 654 127,30	361 577 777 615,00	463 644 431 742,30

Remitansi dicatat melalui Bank Indonesia dan PT POS, dan setiap triwulannya selalu mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Penyaluran remitansi melalui PT Post tercatat lebih tinggi dibandingkan melalui Bank Indonesia. Kondisi ini dimungkinkan karena masyarakat perdesaan lebih familiar dengan PT POS dan keberadaan PT POS menjangkau hampir setiap desa yang ada di seluruh Provinsi NTB. Kondisi triwulan I-2017 remitansi masuk ke Provinsi NTB mencapai lebih dari 460 milyar rupiah, lebih tinggi dari remitansi pada triwulan II-2017. Ramadhan, Idul Fitri hingga tahun ajaran baru sekolah diduga menjadi penyebab peningkatan remitansi pada tiwulan ini. Dibandingkan remitansi triwulan II-2016, remitansi triwulan II-2017 sedikit lebih rendah. Remitansi yang masuk ke NTB cukup besar peranannya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan apabila disalurkan ke bidang usaha maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.



**Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
Jl. Gunung Rinjani No 2  
Mataram-Nusa Tenggara Barat 83125



**Isa, SE, MM**  
Kepala Bidang Nerwilis  
Telpon: (0370) 621385  
E-mail: isa@bps.go.id  
Website: www.bps.go.id



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.